

Jakpro Segera Umumkan Keuntungan Penyelenggaraan Formula E

JAKARTA (IM) - Direktur Utama (Dirut) PT Jakarta Propertindo (Jakpro), Widi Amanasto, akan mengumumkan keuntungan penyelenggaraan Formula E pada Kamis (23/6).

Kini pihaknya sedang melakukan persiapan sebelum pemaparan di hadapan anggota DPRD DKI Jakarta. "Sebentar lagi ada, panggilannya untuk penjelasan Kamis ya," ujar Widi saat ditemui di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (21/6).

Widi memastikan, penyelenggaraan Formula E memiliki keuntungan karena PT Jakpro merupakan korporasi yang mencari profit. "Kami korporasi, harus untung," kata Widi.

Sebagai informasi, lanjutnya, penyelenggaraan balap mobil listrik tersebut diselenggarakan di Jakarta International E-Priz Circuit (JIEC), Ancol, Jakarta Utara pada Sabtu (4/6). Dalam Dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI tahun anggaran (TA) 2021 disebutkan studi kelayakan penyelenggaraan Formula E mencantumkan beragam keuntungan. Keuntungan tersebut tidak hanya datang dari sisi ekonomi, tetapi juga dari sisi reputasional Jakarta sebagai penyelenggaraan event balap internasional. ● yan

4 Tahun Anies Jadi Gubernur, BPS Catat Kemiskinan di DKI Meningkat

JAKARTA (IM) - Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan angka kemiskinan di DKI Jakarta naik selama 4 tahun dipimpin Gubernur Anies Baswedan.

BPS mencatat, terjadi peningkatan jumlah warga miskin di Jakarta sebanyak 105.160 orang atau naik 0,89 persen periode 2017-2021 atau selama empat tahun Anies Baswedan menjadi Gubernur DKI Jakarta

Menanggapi hal itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria, menyebutkan bahwa peningkatan angka kemiskinan bukan hanya terjadi di Jakarta melainkan hampir di setiap wilayah di Indonesia.

"Ya kalau peningkatan di semua wilayah di seluruh Indonesia meningkat karena adanya pandemic," kata Ariza sapa karibnya di Balaikota DKI Jakarta, Selasa (21/6).

Namun demikian, Ariza mengklaim, pertumbuhan Ekonomi di Jakarta mulai

membaik dan menunjukkan peningkatan yang signifikan.

"Kita lihat angka pertumbuhan ekonomi di Jakarta baik, ada peningkatan yang signifikan," tutur Ariza.

Orang nomor dua di Jakarta ini juga menyebut, dalam beberapa bulan terakhir sudah ada penurunan angka kemiskinan. Hal tersebut karena disebabkan adanya peningkatan pertumbuhan ekonomi di Ibu Kota.

"Sejak beberapa bulan terakhir ini sudah ada penurunan angka kemiskinan karena meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan kita kan kembali normal," tandas Ariza.

"Teman-teman merasakan sekarang hidup kita sudah mulai normal memang tantangannya mulai macet, tapi di sisi lain pertumbuhan ekonomi meningkat, kebutuhan-kebutuhan pokok mulai dapat mencukupi kebutuhan masyarakat," pungkas Ariza menambahkan. ● yan

LBH: Isu Buruknya Kualitas Udara Jakarta Hanya Jadi Komoditas Politik

JAKARTA (IM) - Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta menilai, isu buruknya kualitas udara di DKI Jakarta hanya menjadi komoditas politik bagi pemerintah pusat maupun provinsi. Alhasil, kualitas udara Jakarta tetap buruk dan terus membahayakan kesehatan warga.

"Pada akhirnya upaya pemulihan terhadap polusi udara di DKI Jakarta ini dipolitisir," kata Pengacara Publik LBH Jakarta, Jeanny Sirait saat konferensi pers menyikapi polusi udara Jakarta, Selasa (21/6).

Penilaian Jeanny itu berangkat dari perkara gugatan polusi udara Jakarta yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 4 Juli 2019. Penggugat menuntut pemerintah (tergugat) untuk memenuhi hak warga atas udara sehat.

Penggugat dalam kasus ini adalah 32 warga. Sedangkan tergugat adalah Presiden RI Joko Widodo, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Kesehatan, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Banten (turut tergugat I), dan Gubernur Jawa Barat (turut tergugat II).

Pada September 2021, majelis hakim memutuskan bahwa Jokowi, Anies, dan tiga menteri melakukan perbuatan melawan hukum lantaran laiki memenuhi hak warga atas udara sehat.

Hakim pun menjatuhkan sanksi kepada para pejabat itu untuk mengatasi polusi udara Jakarta. Merespons putusan tersebut, pemerintah pusat mengajukan banding, sedangkan Anies menerima putusan meski banyak dikritik lantaran tidak terlihat jejak perbaikannya. Menurut Jeanny, respons pemerintah pusat dan DKI atas putusan tersebut hanya upaya saling menyalahkan.

Pemerintah pusat, kata dia, menyalahkan Pemprov DKI atas polusi udara. "Pemerintah pusat menyalah-

kan Pemprov DKI, bilang Pemprov tidak melakukan upaya signifikan, apa gubernurnya sibuk 2024 sampai DKI jadi kota terpolutif di dunia," kata Jeanny.

Di sisi lain, lanjut dia, Pemprov DKI juga menyalahkan pemerintah pusat karena mengajukan banding atas putusan PN Jakpus. "Pemda juga menyalahkan pemprov: 'kenapa kamu melakukan upaya hukum sehingga saya tidak bisa melakukan upaya saya dengan maksimal'," tuturnya.

Sikap saling menyalahkan itu, menurut Jeanny, merupakan upaya menjadikan isu polusi udara menjadi komoditas politik belaka.

"Jadi pada akhirnya, kualitas udara bersih di DKI Jakarta dijadikan komoditas politik oleh Pempus dan Pemda," ujarnya.

Menurut dia, pemprov dan pemprov seharusnya saling bekerja sama untuk mengatasi permasalahan buruknya kualitas udara Jakarta ini. Selama mereka masih saling menyalahkan, kesehatan warga Jakarta akan terus terdampak.

"Berbagai riset menunjukkan bahwa polusi udara Jakarta bukan hanya tidak sehat bagi tubuh, tapi juga sudah berbahaya untuk dihirup," ujarnya.

Buruknya kualitas udara Jakarta kembali menjadi sorotan publik akhir-akhir ini. Jakarta menjadi kota dengan kualitas udara terburuk di antara kota-kota besar di dunia dalam waktu-waktu tertentu selama beberapa hari terakhir, menurut data jaringan pemantau kualitas udara real-time IQAir.

Menurut catatan BMKG, memang terjadi peningkatan konsentrasi partikel debu halus (PM_{2,5}) di Jakarta dalam beberapa hari terakhir. Konsentrasi PM_{2,5} di Ibu Kota sempat mencapai level tertinggi pada angka 148 mikrogram per kubik pada pekan lalu. Ini tergolong kualitas udara tidak sehat. ● yan

4 Metropolis

FOTO/ANT



MENJELANG PELUNCURAN SATELIT NANO BUATAN INDONESIA

CEO Pasifik Satelit Nusantara (PSN) Adi Rahman Adiwoso (kedua kanan) mendengarkan penjelasan dari ilmuwan muda Tim Surya Satellite-1 Muhammad Zulfa Dhiyaulhaq (kiri), Setra Yoman Prahyang (kedua kiri) dan Suhandinata (kanan) yang berhasil menciptakan satelit nano atau cubesat sebelum peluncurannya di Jakarta, Selasa (21/6). Satelit kecil pertama buatan ilmuwan muda Indonesia yang merupakan hasil kolaborasi dari PSN, Kementerian Komunikasi dan Informatika, ORARI, Pudak Scientific, Pusteksat LAPAN dan BRIN itu kemudian akan segera diserahkan kepada Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA) untuk diluncurkan pada November 2022 dan dilepaskan dari International Space Station (ISS).

LBH: 21 PLTU di Banten Turut Cemari Udara Jakarta

Pemerintah pusat, seharusnya bisa berbuat lebih banyak untuk mengurangi polusi udara dari 21 PLTU itu. Salah satunya dengan membuat kebijakan pengendalian lingkungan yang lebih ketat. Tapi, alih-alih menekan pencemaran udara dari 21 PLTU itu, pemerintah pusat justru hendak menambah PLTU di sekitar Jakarta.

JAKARTA (IM) - Lembaga Bantuan Hukum (LBH) DKI Jakarta merespons positif keputusan Pemerintah DKI Jakarta yang mencabut izin PT KCN sebagai buntut perkara pencemaran udara. Tapi, LBH DKI menilai tindakan itu belum cukup untuk mengurangi

polusi udara lantaran masih ada banyak sumber polutan di sekitar Ibu Kota.

"PT KCN bukan satu-satunya pelaku pencemaran udara. Ada 21 PLTU di wilayah Banten yang jadi faktor pencemaran udara di Jakarta," kata Pengacara Publik LBH Ja-

karta, Jeanny Sirait dalam media briefing menyikapi polusi udara Jakarta, Selasa (21/6).

Pemerintah pusat, kata dia, seharusnya bisa berbuat lebih banyak untuk mengurangi polusi udara dari 21 PLTU itu. Salah satunya dengan membuat kebijakan pengendalian lingkungan yang lebih ketat.

Tapi, kata Jeanny, alih-alih menekan pencemaran udara dari 21 PLTU itu, pemerintah pusat justru hendak menambah PLTU di sekitar Jakarta. "Anehnya, pemerintah masih memaksakan membuat 9 hingga 10 PLTU tambahan," ujarnya.

Pemerintah DKI Jakarta mencabut izin lingkungan PT KCN pada 17 Juni 2022. Sebab, perusahaan pengelola pelabuhan bongkar muat di Marunda, Jakarta Utara itu

tidak menjalankan sanksi administratif terkait pengelolaan lingkungan sesuai batas waktu yang ditetapkan. Sanksi administratif sebelumnya diberikan karena PT KCN terbukti mencemari lingkungan dengan abu batu bara dari proses bongkar muat.

Pencabutan izin PT KCN ini dilakukan ketika kondisi udara Jakarta sedang menjadi sorotan publik. Jakarta menjadi kota dengan kualitas udara terburuk di antara kota-kota besar di dunia dalam beberapa hari terakhir, menurut data jaringan pemantau kualitas udara real-time IQAir.

Menurut catatan BMKG,

memang terjadi peningkatan konsentrasi partikel debu halus (PM_{2,5}) di Jakarta dalam beberapa hari terakhir. Konsentrasi PM_{2,5} di Ibu Kota sempat mencapai level tertinggi pada angka 148 mikrogram per kubik pada pekan lalu. Hal itu tergolong kualitas udara tidak sehat.

"Tingginya konsentrasi PM_{2,5} dibandingkan hari-hari sebelumnya juga dapat terlihat saat kondisi udara di Jakarta secara kasat mata terlihat cukup pekat atau gelap," kata Plt. Deputi Bidang Klimatologi BMKG, Urip Haryoko dalam siaran persnya, Minggu (19/6).

● yan

FOTO: ANT

Kondisi Cagar Budaya Jembatan Kereta Terowongan Tiga Memprihatinkan

JAKARTA (IM) - Pemerintah Kota Jakarta Timur menyatakan kondisi objek cagar budaya Jembatan Kereta Terowongan Tiga, Kelurahan Palmeriah, Kecamatan Matraman, memprihatinkan dan terbelengkal.

Kepala Seksi Perlindungan Suku Dinas Kebudayaan Jakarta Timur, Iyan Iskandar mengatakan lembaganya menemukan banyak sampah saat meninjau aliran kali di terowongan jembatan tersebut.

Soal sampah di jembatan terowongan yang rusak, pohon liar yang tumbuh merusak jembatan serta retakan di bagian bawah jembatan tiga,

kami sudah menyampaikan surat satu minggu lalu ke PT Kereta Api Indonesia (KAI) di Bandung sebagai pemilik," kata Iyan Iskandar di Jakarta, dikutip dari Antara, Selasa (21/6).

Iyan menuturkan lokasi cagar budaya Jembatan Kereta Terowongan Tiga juga berada dekat dengan lokalisasi Gunung Antang yang dikenal sebagai tempat prostitusi dan perjudian. Bahkan deretan bangunan berupa gubuk liar semi permanen berdiri di atas jembatan yang dibangun pada tahun 1917 tersebut.

"Ya betul, lokasi cagar budaya tidak boleh di lingkun-

gannya ada tempat prostitusi," ujar Iyan.

Dia mengatakan keberadaan objek cagar budaya patut dihari karena peninggalan bersejarah yang bernilai tinggi. "Karena jembatan tersebut memiliki nilai sejarah yang harus kita hormati dan harga," tutur Iyan.

Jembatan Kereta Terowongan Tiga telah ditetapkan sebagai objek cagar budaya melalui Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1498 Tahun 2021. Jembatan tersebut telah berusia kurang lebih 105 tahun dengan panjang kurang lebih enam meter, lebar kurang lebih tujuh meter. ● yan

Pemkab Bekasi Akan Terapkan Reward dan Punishment Guna Tingkatkan Peringkat SAKIP dan RB

CIKARANG PUSAT (IM) - Pj. Bupati Bekasi, Jawa Barat, Dani Ramdan, akan menerapkan sistem penghargaan (reward) dan hukuman (punishment) bagi perangkat daerah yang mencapai target penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Reformasi Birokrasi (RB).

Hal itu bertujuan agar penilaian SAKIP dan RB Pemerintah Kabupaten Bekasi dapat mencapai target yang diinginkan, yakni minimal B.

"Kita terapkan reward bagi Perangkat Daerah yang bisa mencapai target yang sudah ditetapkan, dan punishment bagi yang belum mencapai

target," ucap Pj. Bupati Bekasi, usai membuka Rapat Akselerasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Reformasi Birokrasi (RB) di Ruang Rapat Bupati, Gedung Bupati Bekasi, Komplek Perkantoran Pemkab Bekasi, Senin (20/6).

Ia menjelaskan reward yang akan diberikan pada Perangkat Daerah apabila berhasil memenuhi target yang telah ditentukan, yakni berupa piagam penghargaan serta prioritas dalam penganggarannya. Sedangkan punishment yang akan diberikan salah satunya berupa pergantian pejabat di perangkat daerah tersebut.



Pj. Bupati Bekasi, Dani Ramdan (tengah atas), Sekretaris Daerah Pemkab Bekasi, Dedy Supriyadi (kiri atas) dan Asisten Administrasi Umum Pemkab Bekasi, Edi Rochyadi (kanan atas) saat Rapat Akselerasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Ruang Rapat Bupati, Cikarang Pusat, Senin (20/6).

"Rewardnya selain penghargaan dan piagam, sisi anggarannya juga bisa diprioritaskan. Sedangkan punishmentnya penggantian pejabat atau tindakan-tindakan lebih

lanjut," tuturnya dalam rilis Prokopim Setdakab Bekasi, Selasa (21/6).

Lebih lanjut, ia menjelaskan langkah yang diambilnya guna memaksimalkan pen-

tingkatkan penilaiannya, yaitu dengan membagikan peran pada setiap perangkat daerah, pembagian waktunya, serta sistem pelaporan setiap bulannya, sesuai dengan rekomendasi hasil penilaian SAKIP dan RB tahun 2021 yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

"Kami sudah bagikan peran setiap perangkat daerahnya berdasarkan rekomendasi yang telah diterima. Kita tentukan waktunya dan laporannya setiap sebulan sekali," terangnya.

Dengan begitu, diharapkan masing-masing perangkat daerah menerapkan langkah-langkah yang telah ditentukan dan dapat lebih termotivasi lagi dalam meningkatkan penilaian SAKIP dan RB Pemkab Bekasi.

"Mudah-mudahan semua perangkat daerah jadi lebih termotivasi lagi dalam meningkatkan hasil penilaian SAKIP dan RB, dan jangan sampai ada yang dapat punishment-nya," harapnya.

Pada kesempatan tersebut turut hadir Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi Dedy Supriyadi, Asisten Administrasi Umum Edi Rochyadi, serta jajaran Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemkab Bekasi. ● mdl

PT TIARA ADI KENCANA ("Perseroan")
PENGUMUMAN KEHILANGAN

Telah hilang asli dari Sertipikat Keanggotaan Permanen yang dapat dipindahkembangkan (*Permanent Transferable Membership Certificate*) Damai Indah Golf & Country Club No. 329 atas nama PT Tiara Adi Kencana yang diterbitkan pada tanggal 13 September 1993 ("Sertipikat"). Kehilangan Sertipikat tersebut sudah dilaporkan ke Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Metro Jaya Resor Metropolitan Jakarta Pusat

Pemberitahuan ini dibuat oleh Perseroan untuk memenuhi persyaratan dari Damai Indah Golf & Country Club atas pengajuan duplikat Sertipikat yang hilang tersebut. Apabila ada pihak-pihak yang berkeberatan agar segera menghubungi Kantor Pusat Perseroan di Jl. Tanah Abang III No. 14, Petjo Selatan, Gambir, Jakarta Pusat 10160, telepon (021) 3853624/25 selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak diterbitkannya pemberitahuan ini.

Jakarta, 22 Juni 2022
Direksi
PT. Tiara Adi Kencana

PENGUMUMAN PENGAMBILALIHAN SAHAM PT CAHAYA LENTERA HARAPAN BARU

Direksi PT Cahaya Lentera Harapan Baru ("Perseroan"), suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Kota Depok, dengan ini mengumumkan rencana pengambilalihan atas sebagian saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sehubungan dengan rencana pengambilalihan saham Perseroan tersebut di atas, maka bagi pihak (pihak) yang berkepentingan dan/atau kreditor (kreditor) Perseroan yang memiliki keberatan dapat mengajukan keberatan secara tertulis berikutan bukti-bukti yang sah selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak tanggal pengumuman ini. Adapun keberatan-keberatan tersebut dapat ditunjukkan ke alamat sebagai berikut:

PT CAHAYA LENTERA HARAPAN BARU
Jl. Putri Tunggal RT.007, RW. 007
Harjamukti, Cimanggis
Kota Depok
U.p. Romuliana Marlina

Pengumuman ini disampaikan untuk memenuhi ketentuan Pasal 127 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Jakarta, 22 Juni 2022
Direksi
PT Cahaya Lentera Harapan Baru